

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia telah memasuki masa penguatan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh pihak termasuk pemerintah dengan melakukan reformasi di segala bidang. Salah satu usaha menguatkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *good governance* (Darwanis dan Chairunnisa, 2013). Sebagai perwujudan *good governance* maka pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, hal ini dibuktikan dengan menyampaikan informasi yang relevan atas hasil dari program yang telah dilaksanakan pemerintah.

Kota Madiun sebagai salah satu daerah yang memiliki hak otonomi diwajibkan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa menjadi perhatian serius bagi aparatur pemerintah Kota Madiun. Penegakan kinerja aparatur pemerintah merupakan perwujudan tuntutan undang-undang yang berlaku melalui aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Jadi, dapat dipahami bahwa saat ini Kota Madiun terus berusaha untuk menjadi pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan. Demikian

juga dengan penerapan laporan keuangan pemerintah harus dapat membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas. Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Demi mewujudkan laporan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dilakukan penyempurnaan terus-menerus dengan PP No 58 tahun 2005 (Darwanis dan Chairunnisa, 2013).

Perbaikan pengelolaan keuangan terus dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun untuk mendapatkan kualitas laporan keuangan yang semakin baik, dengan mengawasi kualitas laporan keuangan instansi pemerintah. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Darwanis dan Chairunnisa, 2013).

Pengelolaan laporan keuangan instansi pemerintah tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah. Anggaran digunakan untuk melaksanakan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Adanya sasaran

anggaran yang jelas akan memudahkan pemerintah untuk menyusun target-target anggaran, sehingga dapat menjadikan anggaran yang telah direncanakan menjadi tepat sasaran (Darwanis dan Chairunnisa, 2013).

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja pemerintah dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Yulianti, Reni., Hardi, dan Rusli 2014).

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya (Darwanis dan Chairunnisa, 2013).

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa penerapan akuntansi keuangan daerah, pengawasan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan memiliki peran yang penting dalam mewujudkan perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah dan mewujudkan manajemen keuangan pemerintah. Karena itulah berbagai upaya dilakukan agar Kota Madiun dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat,

sehingga tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya *good governance* di Kota Madiun dapat tercapai (Darwanis dan Chairunnisa, 2013).

Penerapan akuntansi keuangan daerah, pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan akuntabilitas pun menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian yang menguji pengaruh penerapan akuntansi keuangan daerah dan pengawasan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan oleh Darwanis dan Chairunnisa (2013). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan akuntansi keuangan daerah dan pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan, penelitian yang menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan oleh Yulianti, dkk (2014). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Darwanis dan Chairunnisa (2013) dan penelitian Yulianti, dkk (2014). Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian Darwanis dan Chairunnisa (2013) yaitu Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang ada di Provinsi Aceh dan objek penelitian Yulianti, dkk (2014) yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pelalawan sedangkan objek penelitian yang akan saya teliti yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun pada tahun 2016. Selain

itu letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian Darwanis dan Chairunnisa (2013) yaitu pada variabel independen yang diteliti antara lain pengaruh penerapan akuntansi keuangan daerah, pengawasan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah, dan kejelasan sasaran anggaran, sedangkan pada penelitian yang akan saya teliti ditambahkan variabel sistem pelaporan dari penelitian Yulianti, dkk (2014) sebagai variabel independen untuk memantau dan mengendalikan kinerja atasan dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan agar terealisasi suatu sistem pelaporan yang baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengambil judul penelitian **“Pengaruh Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah, Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada OPD Kota Madiun)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah penerapan akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Madiun?
2. Apakah pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Madiun?
3. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Madiun?

4. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Madiun?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh penerapan akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Madiun.
2. Pengaruh pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Madiun.
3. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Madiun.
4. Pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Madiun.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam ilmu akuntansi sektor publik secara umum diantaranya *good governance*, transparansi, dan akuntabilitas, serta literatur mengenai akuntansi keuangan daerah, kualitas laporan keuangan, sasaran anggaran, dan sistem pelaporan.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik.

## 3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan sebagai studi komparatif bagi peneliti yang mendalami masalah ini di masa yang akan datang.

## **E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi**

Dalam penulisan skripsi yang dibuat, tersusun sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini berisi telaah literatur dan pengembangan hipotesis serta kerangka konseptual atau model penelitian.

### **BAB III METODA PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, lokasi dan waktu penelitian, data dan prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis.

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.